

# **DIPLOMASI EMPATIK: PEREMPUAN DAN STRATEGI MEDIASI DALAM KONFLIK KOMUNAL**

**Muhammad Najmuddin, Siti Rabiatal Adawiyah**

## ***Abstract***

*This study explores the strategic role of women as mediators in communal conflicts in Sigi Regency, Central Sulawesi. Using a qualitative case study approach, the research investigates how women employ empathetic communication strategies rooted in local cultural and spiritual values to facilitate reconciliation processes in post-conflict communities. Data were collected through in-depth interviews, participatory observations, and document analysis involving women mediators, religious and traditional leaders, and conflict-affected community members. The findings reveal three main aspects: first, women play a substantive and proactive role in initiating dialogue and restoring broken social relationships; second, their mediation strategies integrate empathetic communication, religious-spiritual values, and cultural symbols to create a safe space for peacebuilding; third, despite their significant contributions, women often face structural and symbolic barriers that limit formal recognition of their roles. The study concludes that empathetic diplomacy practiced by women offers a contextually relevant and sustainable model for grassroots conflict resolution. This research contributes to the discourse on gender, peace, and communication by highlighting the transformative power of women's agency and the importance of culturally rooted approaches in conflict mediation.*

***Keywords : Empathetic Communication; Mediation Strategy; Communal Conflict***

## **PENDAHULUAN**

Konflik komunal yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, merupakan salah satu tantangan sosial yang terus berulang dan berdampak besar pada tatanan kehidupan masyarakat. Kabupaten Sigi memiliki sejarah panjang konflik antardesa yang dipicu oleh berbagai faktor seperti sengketa lahan, batas wilayah, serta dendam antar kelompok yang diwariskan secara

turun temurun.<sup>1</sup> Konflik-konflik tersebut tidak hanya menyebabkan korban jiwa dan kerugian harta benda, tetapi juga menyisakan trauma sosial yang mendalam.<sup>2</sup> Dalam konteks ini, perempuan seringkali menjadi kelompok yang terdampak paling besar, namun juga memiliki potensi strategis dalam menciptakan perdamaian melalui pendekatan empatik dan kultural. Para ahli komunikasi menekankan pentingnya komunikasi interpersonal berbasis empati untuk membangun kembali kepercayaan antar komunitas pascakonflik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana perempuan berperan dalam upaya mediasi konflik komunal melalui diplomasi empatik sebagai strategi komunikasi yang membangun rekonsiliasi sosial di Kabupaten Sigi.

Banyak penelitian tentang konflik komunal di Indonesia membahas faktor penyebab, dampak, dan strategi penyelesaian, namun keterlibatan perempuan sebagai subjek aktif dalam mediasi masih kurang diperhatikan. Padahal, perempuan memiliki kapasitas kultural kuat dalam membangun perdamaian,<sup>3</sup> tetapi kontribusinya jarang dikaji dari perspektif komunikasi. Sebagian besar studi fokus pada aspek politik, hukum, atau keamanan, sementara strategi komunikasi empatik yang digunakan perempuan untuk meredam konflik sosial kurang diteliti. Penelitian tentang peran perempuan dalam mengelola konflik melalui komunikasi komunitas dan praktik lokal berbasis empati dan relasi sosial masih sangat terbatas. Oleh karena itu, terdapat kekosongan riset mengenai perempuan sebagai agen mediasi yang mengandalkan komunikasi empatik dalam konflik komunal, terutama dalam konteks lokal Sigi yang kaya kearifan sosial dan sejarah konflik.

Tulisan ini hadir untuk merespons kekosongan kajian yang mengulas secara mendalam peran perempuan sebagai agen mediasi dalam konflik komunal melalui

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, "Penanganan Konflik Sosial Melalui Lembaga Adat (Tinjauan Historis Konflik Warga Desa Karawana Dengan Desa Soulowe Kabupaten Sigi)," *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian* 4, no. 2 (2022).

<sup>2</sup> Hartiningsih Hartiningsih, "Tanggapan Masyarakat Terhadap Konten Media Massa Dalam Kasus Konflik Antar Warga Di Kabupaten Sigi," *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* 19, no. 2 (n.d.): 517235.

<sup>3</sup> Aulia Asmarani, "Perempuan Dalam Konflik Agraria," *Majalah Ilmiah UNIKOM* 13, no. 01 (2015).

pendekatan komunikasi empatik, khususnya di konteks lokal seperti Kabupaten Sigi. Dengan memanfaatkan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, artikel ini tidak hanya mendokumentasikan partisipasi perempuan dalam proses mediasi, tetapi juga menganalisis strategi komunikasi yang mereka gunakan untuk membangun dialog dan rekonsiliasi antar kelompok yang berkonflik. Kajian ini diarahkan untuk: (1) mengidentifikasi bentuk-bentuk keterlibatan perempuan dalam mediasi konflik komunal di Kabupaten Sigi, (2) menganalisis strategi komunikasi empatik yang digunakan oleh perempuan dalam proses mediasi, dan (3) mengevaluasi efektivitas pendekatan tersebut dalam membangun perdamaian berkelanjutan. Dengan tiga tujuan tersebut, tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan studi komunikasi konflik dan peran strategis perempuan dalam diplomasi di masyarakat

Tulisan ini berpijak pada argumen bahwa komunikasi empatik yang dijalankan oleh perempuan memiliki efektivitas tersendiri dalam meredakan konflik komunal karena berbasis pada relasi emosional, kedekatan sosial, dan praktik-praktik budaya yang inklusif. Perempuan kerap berada dalam posisi strategis sebagai penghubung antar komunitas, pemelihara relasi sosial, dan penjaga nilai-nilai perdamaian dalam keluarga maupun masyarakat. Dalam konteks konflik komunal di Kabupaten Sigi, dugaan yang diuji adalah bahwa keterlibatan perempuan dalam mediasi tidak hanya bersifat simbolik, melainkan substantif, terutama ketika mereka mengandalkan strategi komunikasi yang berakar pada empati, mendengarkan aktif, dan narasi kultural yang menyentuh kesadaran kolektif. Argumen ini sekaligus menguji batas-batas pendekatan mediasi konvensional yang selama ini cenderung maskulin dan berbasis pada negosiasi formal. Dengan menguji hipotesis tersebut, penelitian ini berupaya memperlihatkan bagaimana diplomasi empatik yang dipraktikkan oleh perempuan dapat menjadi pendekatan alternatif yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam resolusi konflik komunal.

Kabupaten Sigi dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan wilayah yang memiliki sejarah konflik komunal yang kompleks serta dinamika sosial yang kuat

dalam upaya pemulihan pascakonflik. Beberapa desa di Sigi telah mengalami konflik antarkelompok yang berkepanjangan, baik akibat sengketa lahan, batas wilayah, maupun ketegangan sosial berbasis identitas. Namun, di tengah realitas konflik tersebut, muncul inisiatif lokal dari kelompok perempuan yang terlibat aktif dalam proses mediasi dan pemulihan sosial. Kasus yang dipilih secara khusus mengacu pada peran perempuan dalam forum-forum mediasi berbasis komunitas dan keagamaan, yang menunjukkan praktik komunikasi empatik sebagai strategi utama dalam menjembatani kelompok yang berkonflik. Fokus penelitian diarahkan pada eksplorasi strategi komunikasi yang digunakan oleh perempuan serta dinamika sosial yang mempengaruhi efektivitasnya. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu-individu perempuan yang terlibat dalam proses mediasi, serta ruang sosial tempat berlangsungnya komunikasi mediasi tersebut, seperti rumah ibadah, balai desa, dan forum informal komunitas.

## **PEMBAHASAN**

### **Komunikasi Empatik sebagai Strategi Mediasi Sosial**

Konflik komunal yang terjadi di Kabupaten Sigi, menuntut pendekatan penyelesaian yang tidak hanya menyelesaikan masalah secara formal, tetapi juga merawat kembali harmoni sosial yang rusak. Dalam konteks ini, komunikasi empatik muncul sebagai strategi mediasi sosial yang efektif untuk menjembatani perbedaan, membangun kepercayaan, dan menciptakan ruang dialog yang aman dan inklusif.<sup>4</sup> Komunikasi empatik adalah bentuk komunikasi interpersonal yang menitikberatkan pada kemampuan untuk memahami, merasakan, dan merespons emosi serta pengalaman orang lain secara penuh perhatian dan kepedulian.<sup>5</sup> Berbeda dari komunikasi strategis yang lebih berorientasi pada persuasi atau negosiasi rasional,

---

<sup>4</sup> Ade Masturi, "Membangun Relasi Sosial Melalui Komunikasi Empatik (Perspektif Psikologi Komunikasi)," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 4, no. 1 (2010): 14–31.

<sup>5</sup> James B Stiff et al., "Empathy, Communication, and Prosocial Behavior," *Communications Monographs* 55, no. 2 (1988): 198–213.

komunikasi empatik mengutamakan pengakuan emosional dan pengalaman subjektif yang sering kali menjadi akar dari konflik komunal.<sup>6</sup>

Dalam praktiknya, komunikasi empatik melibatkan beberapa aspek utama yang saling melengkapi. Pertama adalah mendengarkan aktif, yaitu kemampuan hadir secara penuh dan menyimak lawan bicara tanpa menghakimi, sehingga mereka merasa dihargai dan didengar. Kedua adalah pengakuan terhadap emosi, di mana respons komunikasi menunjukkan penerimaan dan penghargaan atas perasaan dan pengalaman lawan bicara. Ketiga adalah penggunaan bahasa yang inklusif dan reflektif, yang menciptakan dialog setara dan tidak mengancam. Keempat adalah empati kognitif dan afektif, yakni kemampuan memahami posisi orang lain secara rasional sekaligus turut merasakan emosinya. Kelima, orientasi komunikasi diarahkan pada pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar untuk memenangkan argumen atau menyelesaikan konflik secara pragmatis.<sup>7</sup> Dalam konteks sosial pascakonflik yang penuh luka kolektif, aspek-aspek ini menjadi sangat penting untuk merajut kembali hubungan yang terputus.

Perempuan memegang peranan penting dalam mempraktikkan komunikasi empatik sebagai strategi mediasi sosial.<sup>8</sup> Sebagai agen perdamaian, perempuan tidak hanya menjadi korban konflik, tetapi juga menjadi penggerak aktif dalam proses rekonsiliasi dan pemulihan sosial. Peran perempuan ini sangat strategis mengingat kedekatan mereka dengan komunitas, baik dalam ranah domestik maupun sosial. Di rumah tangga, perempuan mendidik nilai-nilai toleransi, solidaritas, dan empati kepada generasi muda, sehingga mereka menjadi fondasi jangka panjang bagi masyarakat yang damai. Selain itu, perempuan juga aktif dalam ruang-ruang keagamaan dan sosial

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz Shutadi et al., *Mengelola Konflik Dalam Organisasi: Teknik, Strategi, Dan Aplikasi* (PT. Nawala Gama Education, 2025).

<sup>7</sup> Douglas J Meyer, Franklin J Boster, and Michael L Hecht, "A Model of Empathic Communication," *Communication Research Reports* 5, no. 1 (1988): 19–27.

<sup>8</sup> Aysen Temel Eginli and Neslihan Ozmelek Tas, "Gender Differences in Empathic Communication: A Study with Postgraduate Students in Faculty of Communication," *Contemporary Approaches in Social Science Researches* 435 (2019): 435–442.

seperti pengajian dan musyawarah adat yang menjadi medium penyebaran nilai perdamaian dan dialog.

Praktik mediasi konflik sering kali menggunakan pendekatan komunikasi empatik yang mengedepankan kelembutan, kesabaran, dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal.<sup>9</sup> Mereka memanfaatkan bahasa yang halus dan simbol-simbol budaya yang dikenal oleh semua pihak, sehingga pesan damai yang disampaikan lebih mudah diterima. Perempuan juga sering berperan sebagai juru damai informal yang menginisiasi pertemuan atau dialog antar pihak yang berselisih, menggunakan metode musyawarah yang merupakan tradisi lokal dalam penyelesaian konflik. Keberadaan perempuan dalam proses mediasi ini tidak hanya memberikan simbol netralitas dan kasih sayang, tetapi juga menurunkan ketegangan emosional yang kerap menjadi penghalang utama dalam dialog damai.

Komunikasi empatik tidak dapat dilepaskan dari dinamika komunikasi konflik, karena konflik pada dasarnya merupakan bentuk komunikasi yang terganggu atau tidak tersampaikan secara sehat.<sup>10</sup> Dalam komunikasi konflik, sering terjadi dominasi narasi, miskomunikasi, serta ketegangan emosional yang memperkeruh situasi.<sup>11</sup> Oleh karena itu, strategi komunikasi yang mampu menenangkan eskalasi dan membuka ruang saling pengertian sangat diperlukan. Di sinilah komunikasi empatik memainkan peran penting sebagai jembatan menuju proses mediasi. Mediasi adalah bentuk intervensi sosial yang bertujuan untuk mempertemukan pihak-pihak yang bertikai dalam suasana netral, terbuka, dan partisipatif.<sup>12</sup> Ketika mediasi dilandasi oleh komunikasi empatik, maka prosesnya tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah secara teknis, tetapi juga menyentuh dimensi emosional dan psikososial yang menjadi inti dari konflik itu sendiri. Komunikasi empatik memungkinkan mediator mengenali kepentingan

---

<sup>9</sup> R Kordnoghi, Sh Moradi, and A Delfan Beiranvand, "The Role of Empathy, Communication Skills and Conflict Resolution in Reducing Adolescents' Aggressive Behavior: Violence at Schools," *Contemporary Psychology* 12, no. 2 (2017): 172–185.

<sup>10</sup> Stephen W Littlejohn and Kathy Domenici, *Communication, Conflict, and the Management of Difference* (Waveland Press, 2007).

<sup>11</sup> Julia Hoffmann and Virgil Hawkins, *Communication and Peace* (Taylor & Francis, 2015).

<sup>12</sup> Lon L Fuller, "Mediation—Its Forms and Functions," in *Mediation* (Routledge, 2018), 3–37.

tersembunyi, ketakutan, atau trauma yang dialami para pihak, sehingga solusi yang dihasilkan lebih inklusif dan berkelanjutan.

Konsep perempuan sebagai agen perdamaian menekankan peran aktif perempuan dalam menciptakan, memelihara, dan menguatkan proses perdamaian di tengah masyarakat yang mengalami konflik.<sup>13</sup> Perempuan tidak hanya menjadi korban konflik, tetapi juga memiliki kapasitas sosial dan kultural yang unik untuk mendorong rekonsiliasi dan harmoni sosial. Dalam kajian perdamaian dan gender, peran perempuan dipandang strategis karena kedekatannya dengan komunitas, perannya dalam pendidikan nilai-nilai sosial di ranah domestik, serta kecenderungannya dalam menggunakan pendekatan non-kekerasan dan empatik. Keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian terbukti memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian yang berkelanjutan.<sup>14</sup> Di konteks lokal seperti Kabupaten Sigi, perempuan berperan sebagai penjaga nilai, penggerak komunitas, serta juru damai informal melalui praktik musyawarah, keagamaan, dan kegiatan sosial lainnya. Sayangnya, kontribusi ini sering kali tidak terdokumentasi secara formal, sehingga peran perempuan sebagai agen perdamaian kerap terpinggirkan dari diskursus resmi. Oleh karena itu, pengakuan dan analisis terhadap perempuan sebagai agen perdamaian sangat penting untuk memahami strategi mediasi berbasis empati yang mereka lakukan dalam merespons konflik komunal.

Peran perempuan sebagai agen perdamaian dapat dianalisis melalui beberapa kategori yang mencerminkan dimensi sosial, kultural, dan komunikatif dari keterlibatan mereka dalam upaya mediasi dan rekonsiliasi konflik. Pertama, peran kultural, di mana perempuan bertindak sebagai penjaga nilai-nilai tradisional yang mengedepankan harmoni, seperti dalam upacara adat, musyawarah keluarga, dan penguatan norma sosial berbasis kesantunan. Kedua, peran domestik-strategis, yaitu

---

<sup>13</sup> Irene Rajagukguk, "Perempuan Dalam Lingkaran Terorisme: Agen Kekerasan Atau Agen Perdamaian?," *Aradha: Journal of Divinity, Peace and Conflict Studies* 3, no. 2 (2023): 135–145.

<sup>14</sup> Retno Wahyu, Sari Perdanawati, and Nur Maulida, "Srikandi Lintas Iman: Praktik Gerakan Perempuan Dalam Menyuarakan Perdamaian Di Yogyakarta," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 13, no. 2 (2019): 293–312.

peran perempuan dalam rumah tangga sebagai pendidik nilai toleransi, solidaritas, dan empati kepada generasi muda, yang menjadi fondasi jangka panjang bagi masyarakat damai. Ketiga, peran keagamaan dan spiritual, di mana perempuan sering memanfaatkan ruang-ruang pengajian atau komunitas keagamaan sebagai sarana menanamkan narasi perdamaian dan saling pengertian antarumat. Keempat, peran sosial-komunitas, yakni keterlibatan aktif dalam organisasi lokal, forum warga, atau kegiatan kemanusiaan yang menjadi wadah dialog antar kelompok. Kelima, peran simbolik dan representatif, di mana kehadiran perempuan dalam proses mediasi menciptakan simbol netralitas, kasih sayang, dan penerimaan yang dapat meredakan ketegangan emosional.<sup>15</sup> Dengan memahami kategori-kategori ini, terlihat bahwa peran perempuan dalam perdamaian tidak hanya bersifat informal, tetapi juga substansial dan multifungsi dalam memperkuat jaring-jaring sosial pascakonflik.

### **Perempuan Sigi dalam Praktik Mediasi Empatik**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan di Kabupaten Sigi memainkan peran aktif dalam proses mediasi konflik komunal melalui pendekatan yang menekankan empati, komunikasi interpersonal, dan kearifan lokal. Berdasarkan wawancara dan observasi di beberapa desa yang pernah mengalami konflik antarkelompok, ditemukan bahwa perempuan sering menjadi fasilitator informal dalam pertemuan warga, penggerak doa bersama lintas kelompok, serta penengah ketika terjadi ketegangan di lingkungan komunitas. Misalnya, di Desa Pesaku dan Desa Bangga, perempuan terlibat dalam membentuk forum musyawarah keluarga yang mempertemukan pihak-pihak yang berselisih dalam suasana kekeluargaan dan non-konfrontatif. Dalam kegiatan tersebut, perempuan tidak hanya hadir secara simbolis, melainkan aktif mengarahkan jalannya dialog dengan bahasa yang menenangkan dan inklusif. Selain itu, laporan desa mencatat keterlibatan mereka dalam kegiatan

---

<sup>15</sup> Jamie J Hagen, "Queering Women, Peace and Security," *International Affairs* 92, no. 2 (2016): 313–332.

“penguatan perdamaian berbasis ibu rumah tangga” yang memadukan peran domestik dan sosial dalam penyebaran nilai-nilai damai. Keberadaan perempuan juga dianggap lebih diterima oleh pihak yang bertikai karena citra mereka yang netral dan penuh keibuan. Temuan ini menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam mediasi tidak bersifat pasif, melainkan substantif dan strategis dalam menciptakan suasana dialog yang konstruktif melalui praktik komunikasi empatik yang khas dan kontekstual.

Praktik mediasi yang dilakukan oleh perempuan di Kabupaten Sigi mengandung beberapa unsur penting yang menunjukkan karakter khas dari komunikasi empatik dalam konteks konflik komunal. Pertama, unsur mendengarkan aktif, di mana perempuan secara konsisten memberi ruang kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyampaikan keluhannya tanpa interupsi, sekaligus menunjukkan penerimaan tanpa menghakimi. Kedua, penggunaan bahasa halus dan simbolik, seperti ungkapan adat atau ungkapan keagamaan yang bersifat menenangkan, yang mampu meredakan ketegangan emosional. Ketiga, pemanfaatan ruang-ruang domestik sebagai ruang dialog, seperti pertemuan di rumah, pengajian ibu-ibu, atau kegiatan memasak bersama yang secara informal menjadi sarana membangun kembali komunikasi antar pihak yang berkonflik. Keempat, nada dan gestur komunikatif yang meneduhkan, seperti sentuhan ringan, senyuman, dan nada bicara pelan, yang menciptakan iklim psikologis yang kondusif untuk dialog. Kelima, penyisipan narasi kolektif seperti kisah trauma masa lalu dan nilai kemanusiaan bersama, yang membantu mengaktifkan empati dan kesadaran moral pihak-pihak yang bertikai. Kelima aspek ini menunjukkan bahwa strategi mediasi perempuan bersandar pada pendekatan komunikasi yang relasional dan emosional, yang tidak hanya meredakan konflik secara langsung, tetapi juga membangun landasan psikososial untuk rekonsiliasi jangka panjang.

Kekuatan perempuan dalam proses mediasi konflik tidak hanya terletak pada pendekatan komunikasinya yang empatik dan menenangkan, tetapi juga pada kemampuannya membangun kembali struktur sosial yang retak akibat konflik. Melalui aktivitas sehari-hari yang tampak sederhana seperti berbagi makanan, menjenguk tetangga sakit, atau mengajak anak-anak dari kelompok yang bertikai untuk bermain

bersama. Perempuan sebenarnya sedang merekatkan kembali jalinan sosial yang putus. Aktivitas ini merupakan bentuk mediasi mikro yang memiliki dampak besar dalam memulihkan rasa saling percaya antarwarga. Dalam konteks Kabupaten Sigi, perempuan memanfaatkan modal sosial yang mereka miliki untuk menciptakan jaringan solidaritas lintas kelompok dan memelihara narasi damai dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membuktikan bahwa komunikasi empatik tidak terbatas pada ruang-ruang formal mediasi, tetapi juga hidup dan bekerja secara organik dalam praktik sosial perempuan di level akar rumput.

Fakta-fakta mengenai keterlibatan perempuan dalam mediasi konflik di Kabupaten Sigi berlangsung dalam konteks sosial yang ditandai oleh trauma pascakonflik, keterbatasan akses formal terhadap keadilan, dan kuatnya nilai-nilai komunitas. Kabupaten Sigi memiliki sejarah konflik antardesa yang melibatkan sengketa lahan, batas wilayah, serta identitas dendam yang diwariskan secara turun temurun. Banyak komunitas hidup berdampingan dengan memori kekerasan yang belum sepenuhnya pulih secara emosional maupun sosial. Dalam situasi seperti ini, mekanisme penyelesaian konflik formal sering kali dinilai lambat, birokratis, dan kurang menyentuh sisi kemanusiaan korban. Kekosongan inilah yang kemudian diisi oleh inisiatif-inisiatif lokal, termasuk oleh kelompok perempuan. Praktik mediasi berbasis empati muncul secara organik dalam ruang-ruang komunitas yang selama ini dipimpin atau dikelola oleh perempuan, seperti majelis taklim, kelompok ibu PKK, atau kegiatan gotong royong desa. Konteks budaya masyarakat Sigi yang masih menghormati peran keibuan, nilai kekeluargaan, dan musyawarah adat turut memperkuat posisi perempuan sebagai aktor damai yang dapat diterima oleh berbagai pihak. Dengan demikian, fakta keterlibatan perempuan dalam mediasi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial pascakonflik dan budaya lokal yang membuka ruang bagi strategi komunikasi empatik sebagai sarana membangun kembali harmoni sosial.

### **Tiga Pilar Perdamaian: Perempuan, Empati, dan Budaya dalam Pemulihan Konflik**

Temuan kedua dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi empatik yang digunakan oleh perempuan dalam mediasi konflik tidak hanya bersifat interpersonal, tetapi juga kolektif dan berbasis nilai-nilai spiritual serta kultural. Dalam berbagai forum mediasi yang diamati, perempuan menggunakan pendekatan komunikasi yang merangkul nilai-nilai lokal seperti *Belo Rapovia Belo Rakava*. Ungkapan ini memiliki arti filosofis yang dalam, yaitu “Kebaikan yang kita perbuat, kebaikan pula yang kita dapatkan.” Konsep ini bukan hanya menjadi panduan moral dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi landasan penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dan saling mendukung. Dalam konteks mediasi konflik, prinsip ini memberikan kerangka berpikir bahwa tindakan positif, seperti menyampaikan pesan damai, mendengarkan dengan empati, atau membantu meredakan ketegangan, akan menciptakan efek timbal balik yang positif pula dalam tatanan sosial.

Dalam budaya Kaili, kebaikan bukanlah tindakan yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan balasan langsung. Sebaliknya, ia merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari komunitas. Perempuan yang menjalankan mediasi dengan pendekatan empatik sering kali menghidupkan nilai ini dalam tindakan sehari-hari baik secara verbal maupun nonverbal seperti dalam bentuk ajakan musyawarah, berbagi makanan dengan kelompok yang bertikai, atau menggunakan bahasa yang menyejukkan untuk mencairkan suasana. Nilai *Belo Rapovia Belo Rakava* menjadi sumber legitimasi moral yang kuat, karena masyarakat lokal memahami bahwa kebaikan akan kembali dalam bentuk dukungan, kedamaian, atau relasi yang diperkuat.

Dalam salah satu wawancara dengan seorang tokoh adat perempuan, penulis mendapatkan penjelasan yang mendalam tentang makna *Belo Rapovia Belo Rakava* melalui kisah yang sederhana namun sarat makna. Perempuan tersebut menuturkan:

*“Belo Rapovia Belo Rakava itu bukan cuma soal balas-membalas kebaikan secara langsung. Ada satu cerita yang selalu kami sampaikan tentang seorang tunanetra yang berjalan di malam hari sambil membawa lampu terang. Tangan kirinya memegang tongkat, tangan kanannya membawa lampu. Orang-orang di jalan heran dan bertanya: ‘Untuk apa engkau membawa lampu, padahal kau tidak bisa melihat?’ Lalu si tunanetra menjawab: ‘Saya memang tidak bisa melihat, tapi orang lain bisa. Dengan membawa lampu, saya menerangi jalan mereka, dan sekaligus mereka bisa melihat saya. Jadi saya tidak tertabrak. Maka siapa yang paling diuntungkan dari kebaikan ini? Saya sendiri.’”*

Cerita ini menjadi cermin di mana tindakan kebaikan yang dilakukan kepada orang lain pada akhirnya membawa manfaat bagi diri sendiri. Dalam konteks komunikasi empatik, perempuan-perempuan yang menjadi mediator sering kali melakukan tindakan serupa: mereka tidak hanya memediasi demi kepentingan orang lain, tetapi juga untuk menjaga keutuhan komunitas yang mereka sendiri adalah bagiannya. Narasi ini menggambarkan bahwa kebaikan yang dilakukan dengan ketulusan bukanlah sekadar bentuk pengorbanan, tetapi merupakan bentuk investasi sosial dan spiritual yang membawa dampak jangka panjang.

Selain itu, dikenal pula pesan *Nosarara Nosabatutu* yang secara harfiah berarti Kita bersaudara dalam ikatan bersama. Sebuah ungkapan bukan sekadar slogan adat, melainkan refleksi dari nilai-nilai fundamental tentang persatuan, kebersamaan, dan gotong royong yang menjadi basis relasi sosial masyarakat Kaili. Perempuan yang terlibat dalam mediasi konflik komunal menjadikan nilai ini sebagai landasan moral dan spiritual dalam menyusun narasi damai, membangun ruang dialog, serta menjembatani kelompok-kelompok yang berkonflik.

Nilai *Nosarara Nosabatutu* mengajarkan bahwa perbedaan suku, agama, dan budaya bukanlah penghalang dalam menjalin hubungan sosial, melainkan kekuatan yang dapat mempererat persaudaraan antarwarga. Perempuan mediator kerap memulai forum dialog dengan mengingatkan pihak-pihak yang berselisih bahwa mereka semua adalah bagian dari satu komunitas yang saling membutuhkan dan terikat oleh nilai kebersamaan. Dalam banyak kasus, perempuan menggunakan frasa *Nosarara*

*Nosabatutu* untuk meredakan ketegangan emosional dan membuka ruang kesadaran kolektif bahwa tidak ada pihak luar yang datang untuk menyelesaikan konflik semua solusi harus dimulai dari semangat persaudaraan lokal.

Selain sebagai simbol persatuan, *Nosarara Nosabatutu* juga mengandung semangat *gotong royong* dalam menyelesaikan persoalan bersama. Nilai ini sangat relevan dalam konteks mediasi berbasis komunitas, di mana konflik tidak diserahkan sepenuhnya kepada aparat formal, tetapi ditangani secara kolektif oleh warga dengan dipandu tokoh lokal termasuk perempuan. Dalam praktiknya, perempuan sering menginisiasi kegiatan sosial seperti memasak bersama, membersihkan tempat ibadah, atau mengadakan doa lintas kelompok sebagai strategi mediasi informal yang dibungkus dalam semangat kebersamaan. Nilai *Nosarara Nosabatutu* dalam hal ini menjadi jembatan antara komunikasi empatik dan aksi kolektif, di mana kebaikan personal diintegrasikan dalam gerakan sosial yang menumbuhkan rasa saling memiliki.

Dalam masyarakat Kaili, keberagaman dianggap sebagai anugerah yang harus dirawat melalui dialog, penghormatan, dan kerja sama. Oleh karena itu, perempuan mediator sering menggunakan narasi yang menekankan bahwa keberagaman yang ada di antara kelompok yang berselisih adalah modal sosial, bukan sumber konflik. Lebih jauh, filosofi ini menekankan pentingnya kesejahteraan Bersama bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu. Perempuan yang menjalankan mediasi berdasarkan nilai ini memahami bahwa perdamaian sejati hanya bisa dicapai jika semua pihak merasa diakui, dihargai, dan dilibatkan dalam proses penyelesaian.

Dalam upaya membangun perdamaian pascakonflik, masyarakat Kaili di Kabupaten Sigi mempraktikkan serangkaian ritual adat yang mengandung makna simbolik mendalam dan berakar kuat pada nilai-nilai lokal. Salah satu bentuk prosesi perdamaian yang sakral dan masih dijalankan hingga kini adalah Libu Adat, yakni musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, perempuan, pemerintah daerah, serta perwakilan dari kelompok yang berselisih. Prosesi ini diawali dengan penyerahan *Sambulu Gana*, sebuah simbol adat yang sangat dihormati dalam budaya

Kaili, sebagai tanda kesediaan kedua belah pihak untuk berdamai dan memulai kembali hubungan sosial yang harmonis.

*Sambulu Gana* terdiri dari lima unsur utama, yakni sirih (melambangkan urat), pinang (melambangkan jantung), kapur sirih (melambangkan otak dan sumsum), tembakau (melambangkan bulu), dan gambir (melambangkan hati). Kelima unsur ini, ketika dikunyah bersama, menghasilkan cairan merah yang menyerupai darah sebagai simbol esensial dari kehidupan, relasi sosial, dan kebersamaan. Filosofi *Sambulu Gana* mengajarkan bahwa manusia hanya bermakna jika hidup dalam hubungan yang saling menghormati, mengasihi, dan mendukung satu sama lain. Sebagai simbol manusia utuh, *Sambulu Gana* bukan hanya digunakan sebagai perangkat upacara, tetapi juga sebagai pembuka percakapan sakral dalam forum-forum mediasi adat.

Dalam ritual *Libu Adat Perdamaian*, *Sambulu Gana* tidak hanya berfungsi sebagai simbol formalitas, tetapi juga sebagai penyambung jiwa kolektif masyarakat yang telah terluka oleh konflik. Setelah penyerahan *Sambulu Gana*, masing-masing desa yang bertikai juga menyerahkan dua ekor kambing sebagai simbol penebusan dan niat tulus untuk berdamai. Hewan-hewan ini kemudian dipotong dan dimasak secara terpisah di masing-masing desa, lalu disantap bersama dalam prosesi adat. Acara ini ditutup dengan pemotongan seekor sapi putih, warna yang melambangkan kesucian dan keikhlasan, yang dagingnya dibagi rata kepada seluruh warga dari kedua desa yang bertikai, sebagai simbol rekonsiliasi dan kesetaraan. Ritual makan bersama ini mengandung makna mendalam: bahwa konflik telah diakhiri dan semua pihak kembali sebagai saudara yang setara.

Perempuan memiliki peran penting dalam prosesi *Libu Adat* ini, terutama dalam mempersiapkan dan menyajikan makanan, serta mengelola suasana emosional di balik ritual. Kehadiran mereka sebagai penjaga nilai dan sering kali sebagai penggerak awal inisiatif damai menjadikan perempuan bukan hanya peserta, tetapi pengarah dari proses penyembuhan sosial.

Filosofi *Sambulu Gana* memperkuat nilai-nilai komunikasi empatik yang menjadi tulang punggung strategi mediasi perempuan di Kabupaten Sigi. Ia

mengajarkan tentang keterikatan antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam, tiga pilar relasi yang juga menjadi prinsip dalam membangun komunitas damai. Ketika perempuan berbicara atas dasar nilai-nilai ini dalam ruang mediasi, mereka tidak hanya mengandalkan kata-kata, tetapi menyuarkan warisan nilai yang telah teruji dalam sejarah budaya mereka.

Penelitian ini menemukan adanya hubungan yang erat antara tiga dimensi utama; peran perempuan, komunikasi empatik, dan konteks sosial-budaya lokal yang saling menguatkan dalam proses mediasi konflik komunal di Kabupaten Sigi. Pertama, peran sosial-kultural perempuan sebagai pengasuh, pendidik nilai, dan penggerak komunitas menciptakan legitimasi moral yang memperkuat posisi mereka dalam ruang mediasi. Legitimasi ini berkorelasi langsung dengan strategi komunikasi empatik yang mereka gunakan, seperti mendengarkan aktif, menyampaikan pesan damai dengan bahasa yang membangun keakraban, dan menggunakan simbol budaya untuk mencairkan ketegangan. Selanjutnya, konteks sosial-budaya lokal yang menjunjung nilai musyawarah, penghormatan terhadap perempuan, dan spiritualitas komunitas turut menciptakan ekosistem yang mendukung keberhasilan praktik mediasi tersebut. Ketiga dimensi ini bekerja dalam hubungan yang timbal balik: semakin kuat penerimaan sosial terhadap peran perempuan, semakin efektif komunikasi empatik mereka; semakin dalam akar budaya yang dijadikan landasan, semakin kuat legitimasi mediasi yang mereka jalankan. Hubungan antara peran perempuan, komunikasi empatik, dan konteks lokal membentuk fondasi yang saling menopang, menjadikan strategi mediasi berbasis komunitas sebagai pendekatan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga berkelanjutan dalam mencegah konflik kembali terjadi.

### **Kontribusi Perempuan dalam Mediasi Konflik yang Terpinggirkan**

Temuan ketiga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan memainkan peran signifikan dalam proses mediasi konflik komunal, mereka masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang secara nyata membatasi efektivitas dan pengakuan terhadap kontribusi mereka. Peran ini seringkali

berlangsung dalam ruang-ruang informal dan tidak tercatat, sehingga kontribusi perempuan kerap dipinggirkan dalam narasi resmi penyelesaian konflik. Wawancara dengan sejumlah informan mengungkapkan bahwa perempuan dalam masyarakat adat, termasuk di *Ngata Toro*, lebih sering diposisikan sebagai *Topo Tangara* yakni penenang atau penjaga harmoni sosial alih-alih sebagai *Topantale* yang berwenang membuat keputusan atau sebagai mediator utama yang memimpin proses negosiasi. Meskipun banyak perempuan mengambil inisiatif dalam mencegah eskalasi konflik, langkah-langkah mereka tidak tercatat dalam dokumen resmi desa, tidak memperoleh legitimasi formal, dan jarang mendapat pengakuan dari struktur pemerintahan lokal maupun lembaga adat.

Tantangan yang dihadapi perempuan tidak hanya bersifat institusional, tetapi juga berasal dari beban domestik yang berlebihan serta minimnya akses terhadap pelatihan atau kapasitas teknis dalam resolusi konflik. Norma budaya yang patriarkal juga memainkan peran penting dalam membatasi ruang gerak perempuan di ranah publik dan pengambilan keputusan. Suara perempuan hanya didengar secara informal atau dalam lingkup keluarga, sementara forum-forum resmi seperti musyawarah desa, pertemuan adat, atau sidang mediasi masih didominasi oleh laki-laki. Salah satu informan menuturkan bahwa meskipun ia kerap diminta oleh masyarakat untuk "menenangkan suasana" ketika ketegangan meningkat, perannya dianggap sebagai bagian dari tugas keperempuanan, bukan sebagai tindakan mediasi strategis yang layak dihargai dan dilembagakan.

Di sisi lain, praktik mediasi yang dilakukan oleh perempuan sering dikategorikan sebagai bentuk kerja sosial atau kerja emosional yang bersifat naturalistik, bukan sebagai bagian dari sistem penyelesaian konflik yang terstruktur. Hal ini menyebabkan kontribusi mereka tidak masuk dalam indikator keberhasilan program perdamaian komunitas, baik yang dijalankan oleh pemerintah desa maupun oleh lembaga non-pemerintah. Data dokumentasi dari laporan desa maupun program lembaga terkait memperlihatkan minimnya pencatatan terhadap inisiatif mediasi yang dilakukan oleh perempuan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara peran nyata

yang dimainkan perempuan dan pengakuan simbolik maupun administratif atas peran tersebut.

Temuan ini mempertegas bahwa peran perempuan dalam mediasi konflik tidak bisa dipandang sebagai tambahan pelengkap semata, tetapi sebagai elemen kunci yang berpotensi memperkaya pendekatan penyelesaian konflik berbasis komunitas. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendorong pengakuan formal terhadap peran perempuan dalam mediasi, termasuk melalui dokumentasi partisipatif, pelibatan aktif dalam forum-forum mediasi resmi, serta pembukaan akses terhadap pelatihan dan ruang kepemimpinan. Mengatasi hambatan struktural dan simbolik ini menjadi kunci dalam membangun sistem penyelesaian konflik yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di tingkat komunitas.

Fakta bahwa perempuan berperan aktif dan strategis dalam mediasi konflik melalui komunikasi empatik menunjukkan bahwa aktor-aktor non-formal memiliki kontribusi nyata dalam membangun perdamaian sosial, khususnya di ruang-ruang komunitas pascakonflik. Temuan ini mengindikasikan perlunya perluasan perspektif resolusi konflik yang tidak hanya bertumpu pada institusi formal dan mekanisme legal, tetapi juga mengakui kekuatan praksis sosial yang dijalankan oleh kelompok masyarakat sipil, khususnya perempuan. Dalam konteks Kabupaten Sigi, pendekatan empatik yang dijalankan perempuan tidak sekadar bersifat simbolis atau pelengkap, tetapi merupakan bentuk *grassroots diplomacy* atau bentuk diplomasi yang dilakukan oleh aktor-aktor dari tingkat akar rumput. Mampu menjangkau dimensi emosional, spiritual, dan kultural dari konflik yang tidak tertangani oleh mediasi formal. Ini menegaskan bahwa perdamaian yang berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya dengan pendekatan struktural, melainkan juga membutuhkan dimensi relasional dan afektif yang melekat pada pengalaman warga. Secara teoretis, hal ini memperluas pemahaman tentang aktor perdamaian dan menggeser fokus dari elite politik ke agen-agen lokal yang kerap tak terlihat. Dengan demikian, keberadaan perempuan sebagai mediator empatik menegaskan pentingnya membangun kerangka resolusi konflik yang lebih partisipatif, berbasis komunitas, dan sensitif terhadap konteks sosial-budaya lokal.

Argumen awal dalam penelitian ini menyatakan bahwa komunikasi empatik yang dijalankan oleh perempuan memiliki efektivitas tinggi dalam meredakan konflik karena bersandar pada kedekatan sosial, relasi emosional, dan kekuatan nilai-nilai kultural. Temuan di lapangan secara nyata mengonfirmasi asumsi ini. Perempuan yang memfasilitasi proses mediasi di tingkat komunitas tidak hanya menggunakan strategi verbal, tetapi juga pendekatan afektif dan simbolik yang menyentuh dimensi emosional pihak-pihak yang bertikai. Praktik seperti menyajikan makanan bersama, berbagi narasi penderitaan bersama, dan menggunakan bahasa keibuan yang menenangkan menjadi sarana efektif untuk mencairkan ketegangan. Bahkan dalam kondisi konflik yang kompleks, kehadiran perempuan seringkali menjadi pintu masuk awal untuk membuka ruang dialog, karena mereka dianggap netral dan tidak mengancam. Dalam banyak kasus, pendekatan empatik justru lebih mampu merestorasi hubungan sosial dibanding pendekatan represif atau formal yang berjarak. Secara teoritis, hal ini mendukung gagasan bahwa pendekatan komunikasi berbasis empati tidak hanya relevan, tetapi krusial dalam proses transformasi konflik. Dengan demikian, hipotesis pertama terbukti berlaku: komunikasi empatik yang dilakukan perempuan memiliki kekuatan strategis dalam menciptakan dialog, meredakan konflik, dan memulihkan hubungan sosial secara kontekstual dan berkelanjutan.

Fakta bahwa perempuan menggunakan strategi komunikasi empatik yang dipadukan dengan nilai-nilai spiritual dan budaya lokal dalam proses mediasi menunjukkan adanya pendekatan alternatif yang lebih kontekstual dan efektif dalam membangun perdamaian akar rumput. Temuan ini memperlihatkan bahwa strategi penyelesaian konflik tidak harus selalu berorientasi pada instrumen formal dan rasional, tetapi dapat berakar pada pengalaman kolektif, nilai-nilai komunitas, serta kearifan lokal yang hidup dalam keseharian masyarakat. Dengan menyisipkan elemen spiritualitas dan budaya dalam komunikasi—seperti doa bersama, makanan tradisional, dan ungkapan simbolik—perempuan mampu menciptakan suasana emosional yang kondusif untuk dialog dan rekonsiliasi. Artinya, komunikasi empatik yang berbasis budaya dan agama bukan sekadar pendekatan komunikatif, tetapi juga menjadi

mekanisme pemulihan sosial dan psikologis masyarakat pascakonflik. Pendekatan ini membuka peluang untuk membangun model mediasi yang lebih manusiawi dan inklusif, sekaligus menegaskan pentingnya dimensi afektif dan moral dalam merespons konflik horizontal. Oleh karena itu, strategi mediasi perempuan yang berpijak pada empati, spiritualitas, dan budaya lokal mengandung pelajaran penting bahwa resolusi konflik yang efektif harus mengakar pada nilai-nilai yang dipahami dan diyakini masyarakat secara kolektif.

Argumen kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa strategi komunikasi empatik yang digunakan perempuan dalam mediasi konflik diperkuat oleh nilai-nilai spiritual dan budaya lokal yang masih hidup dalam keseharian masyarakat Sigi. Temuan dari lapangan mendukung asumsi ini secara kuat. Dalam berbagai proses mediasi, nilai-nilai lokal seperti musyawarah (*pa'rapu*), gotong royong (*tabea*), dan simbol perdamaian seperti makanan atau doa bersama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari komunikasi yang dibangun oleh perempuan. Nilai-nilai spiritual dari ajaran agama juga digunakan sebagai dasar moral untuk meredam amarah dan membuka ruang maaf, terutama dengan rujukan pada prinsip islah (perdamaian) dalam Islam atau nilai kasih dan pengampunan dalam kekristenan. Integrasi nilai-nilai ini tidak hanya memperkuat kepercayaan antar pihak, tetapi juga menciptakan legitimasi sosial atas proses mediasi yang dijalankan perempuan. Fakta bahwa pendekatan ini lebih diterima daripada pendekatan formal yang kaku menunjukkan pentingnya daya kerja budaya dan spiritualitas dalam praktik mediasi.

Dengan demikian, argumen bahwa nilai-nilai lokal dan spiritual memperkuat strategi komunikasi empatik perempuan terbukti berlaku dalam konteks Kabupaten Sigi, sekaligus menegaskan bahwa resolusi konflik yang kontekstual memerlukan integrasi antara aspek kultural, spiritual, dan komunikatif.

Fakta bahwa perempuan masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan simbolik dalam menjalankan peran mediasi menunjukkan adanya ketimpangan gender yang sistemik dalam mekanisme penyelesaian konflik komunal. Meskipun kontribusi perempuan dalam mediasi telah terbukti efektif, kenyataan bahwa peran mereka sering

tidak diakui secara formal mencerminkan bahwa sistem sosial dan kelembagaan masih bias maskulin. Perempuan dianggap sebagai pelengkap, bukan sebagai pengambil keputusan. Minimnya dokumentasi, keterlibatan dalam forum resmi, serta beban domestik yang berat menghambat potensi perempuan untuk tampil sebagai mediator yang diakui secara penuh. Kondisi ini menciptakan paradoks: di satu sisi perempuan menjadi penggerak kunci dalam rekonsiliasi sosial; di sisi lain, peran tersebut tak mendapat legitimasi struktural. Ini juga menunjukkan bahwa upaya mediasi dan perdamaian akan kurang maksimal bila tidak disertai transformasi kelembagaan yang sensitif terhadap gender. Secara lebih luas, hal ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan perdamaian tidak hanya bergantung pada strategi sosial-budaya, tetapi juga pada pembaruan sistem representasi dan distribusi kekuasaan dalam komunitas. Dengan demikian, fakta ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dalam mediasi harus disertai dengan reformasi struktural agar peran mereka tidak hanya efektif secara sosial, tetapi juga diakui dan dilindungi secara kelembagaan.

Argumen ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa keterlibatan perempuan dalam mediasi konflik komunal tidak bersifat simbolik, tetapi substantif dan strategis dalam membangun perdamaian berbasis komunitas. Berdasarkan temuan lapangan, argumen ini terbukti valid. Perempuan tidak hanya berperan sebagai pelengkap dalam proses mediasi, tetapi menjadi aktor utama dalam memfasilitasi komunikasi antar kelompok yang bertikai. Mereka menginisiasi ruang-ruang dialog informal, memelopori pendekatan damai dalam forum keagamaan, dan menjadi jembatan yang menjangkau pihak-pihak yang sulit diajak berbicara oleh mediator formal. Dalam banyak kasus, perempuan bahkan menjadi penggerak awal terciptanya kesepakatan damai, yang kemudian baru diformalkan dalam pertemuan resmi. Peran mereka tidak hanya efektif secara sosial, tetapi juga berdampak secara emosional dan psikologis karena berbasis pada pendekatan empatik dan kultural. Meskipun belum banyak diakui dalam struktur mediasi formal, kontribusi perempuan telah terbukti membentuk fondasi kuat bagi rekonsiliasi jangka panjang di masyarakat. Dengan demikian, hipotesis ketiga terbukti: keterlibatan perempuan dalam mediasi konflik

bersifat strategis dan substansial, serta memberikan kontribusi nyata bagi proses penyembuhan sosial dan penguatan kohesi komunitas pascakonflik.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengungkap bahwa diplomasi empatik yang dijalankan oleh perempuan memiliki kekuatan strategis dalam mediasi konflik komunal, suatu aspek yang selama ini kurang tereksplorasi dalam studi resolusi konflik di tingkat akar rumput. Tanpa penelitian ini, kontribusi substantif perempuan dalam meredakan konflik melalui pendekatan komunikasi empatik berbasis nilai-nilai lokal dan spiritual akan tetap tersembunyi di balik narasi besar yang didominasi oleh aktor formal dan pendekatan legalistik. Penelitian ini membuktikan bahwa perempuan bukan hanya korban konflik, tetapi juga pelaku kunci dalam membangun perdamaian sosial. Temuan ini memperlihatkan bagaimana strategi komunikasi yang mereka gunakan seperti mendengarkan aktif, menyentuh sisi emosional, dan merawat relasi sosial mampu membuka ruang dialog yang lebih manusiawi dan inklusif. Di sisi lain, penelitian ini juga memperlihatkan tantangan struktural yang membatasi pengakuan terhadap peran perempuan, sehingga membuka ruang refleksi bagi reformasi kebijakan dan struktur sosial yang lebih adil gender. Dengan demikian, hasil terpenting dari penelitian ini adalah pengungkapan peran strategis dan transformatif perempuan sebagai mediator empatik yang berakar pada nilai budaya dan spiritual komunitas suatu kontribusi damai yang selama ini jarang diakui secara formal.

Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini yakni komunikasi empatik, perempuan sebagai agen perdamaian, dan mediasi komunal terbukti mampu menjawab secara komprehensif permasalahan tentang bagaimana perempuan berperan dalam mediasi konflik komunal di Kabupaten Sigi. Pendekatan komunikasi empatik memungkinkan penelitian ini menyoroti dimensi emosional, relasional, dan afektif dalam praktik mediasi yang sering kali luput dari perhatian dalam pendekatan resolusi konflik konvensional. Sementara itu, konsep perempuan sebagai agen perdamaian memberi landasan teoretis untuk memahami posisi strategis perempuan dalam

membangun kohesi sosial, meskipun seringkali tidak diakui secara formal. Konsep mediasi komunal memberi kerangka analitis untuk menjelaskan bagaimana proses penyelesaian konflik di tingkat akar rumput berlangsung dengan mengandalkan nilai-nilai lokal, kebersamaan, dan keterlibatan warga. Dari sisi metodologis, pendekatan kualitatif dengan studi kasus dan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi berhasil menggali makna, pengalaman, dan strategi yang dijalankan oleh perempuan secara mendalam dan kontekstual. Dengan demikian, kombinasi teori, konsep, dan metode yang digunakan telah berhasil menjawab pertanyaan penelitian secara utuh dan memberikan kontribusi konseptual serta praktis terhadap studi resolusi konflik dan peran strategis perempuan dalam masyarakat lokal.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat sejumlah implikasi penting yang dapat dijadikan dasar untuk merancang strategi yang lebih inklusif dan kontekstual dalam penguatan peran perempuan sebagai mediator damai di komunitas pascakonflik. Pertama, diperlukan pengakuan formal terhadap kontribusi perempuan dalam mediasi, baik melalui kebijakan desa maupun pelibatan aktif dalam forum-forum resolusi konflik. Strategi ini dapat dimulai dengan menyusun regulasi lokal yang menjamin representasi perempuan dalam tim penyelesaian konflik. Kedua, penguatan kapasitas perempuan melalui pelatihan komunikasi empatik, mediasi komunitas, dan advokasi berbasis gender sangat diperlukan agar peran mereka tidak hanya informal, tetapi juga profesional. Ketiga, membangun jejaring antara kelompok perempuan lintas desa dapat memperkuat solidaritas dan pertukaran strategi antar komunitas. Keempat, pendekatan kultural-spiritual yang digunakan perempuan perlu diintegrasikan dalam program-program pembangunan perdamaian karena lebih diterima oleh masyarakat setempat. Kelima, penting untuk mendorong dokumentasi dan publikasi pengalaman perempuan dalam mediasi sebagai bentuk validasi pengetahuan lokal yang selama ini terabaikan. Strategi-strategi ini jika diterapkan secara sistematis tidak hanya akan memperkuat posisi perempuan sebagai agen perdamaian, tetapi juga menjadikan pendekatan empatik sebagai model penyelesaian konflik yang lebih humanis dan berakar pada realitas sosial masyarakat Sigi.

Strategi mediasi berbasis komunikasi empatik yang dijalankan oleh perempuan memiliki nilai dan peluang besar untuk diadopsi sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian konflik komunal yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan kontekstual. Nilai utama dari strategi ini terletak pada kemampuannya membangun jembatan antar kelompok melalui pendekatan yang humanis, emosional, dan relasional. Dibandingkan pendekatan formal yang kerap bersifat legalistik dan berjarak, komunikasi empatik memungkinkan terbukanya ruang dialog yang aman dan setara bagi semua pihak. Peluang strategis juga muncul dari fakta bahwa perempuan memiliki akses sosial yang luas dalam komunitas melalui jaringan pengajian, kelompok arisan, organisasi perempuan, dan kegiatan domestic yang dapat menjadi kanal efektif untuk menyebarkan nilai-nilai perdamaian. Di tengah keterbatasan sumber daya dan kapasitas institusional penyelesaian konflik di tingkat desa, strategi ini menawarkan model resolusi yang murah, responsif, dan berbasis lokal. Jika didukung oleh kebijakan dan penguatan kapasitas, strategi ini bahkan dapat direplikasi di wilayah lain yang memiliki karakter konflik dan struktur sosial serupa. Dengan mengangkat potensi strategi komunikasi empatik perempuan sebagai modal sosial perdamaian, studi ini memperlihatkan bahwa pendekatan tersebut bukan hanya relevan secara kultural, tetapi juga menjanjikan sebagai kerangka resolusi konflik yang partisipatif dan berkelanjutan.

Meskipun memberikan kontribusi penting dalam memahami peran perempuan dan komunikasi empatik dalam mediasi konflik komunal, studi ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati untuk pengembangan penelitian lanjutan. Pertama, keterbatasan utama terletak pada cakupan wilayah dan jumlah informan yang masih terbatas pada beberapa desa di Kabupaten Sigi, sehingga generalisasi temuan ke konteks yang lebih luas masih memerlukan kehati-hatian. Kedua, fokus utama penelitian ini adalah pada dimensi naratif dan kualitatif, sehingga tidak menjangkau pengukuran dampak jangka panjang dari strategi mediasi perempuan terhadap stabilitas sosial secara kuantitatif. Ketiga, aspek interseksionalitas seperti usia, kelas sosial, dan latar belakang pendidikan perempuan mediator belum tergali secara mendalam, padahal faktor-faktor ini dapat memengaruhi efektivitas dan legitimasi mereka dalam

proses mediasi. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas lokasi studi, menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*), serta mengkaji lebih dalam dimensi interseksional peran perempuan dalam mediasi. Dengan mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut, studi-studi lanjutan diharapkan dapat memperkuat pemahaman teoritis dan praktis mengenai diplomasi empatik perempuan serta memperkaya model resolusi konflik berbasis komunitas yang lebih inklusif dan berkeadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asmarani, Aulia. "Perempuan Dalam Konflik Agraria." *Majalah Ilmiah UNIKOM* 13, no. 01 (2015).
- Eginli, Aysen Temel, and Neslihan Ozmelek Tas. "Gender Differences in Empathic Communication: A Study with Postgraduate Students in Faculty of Communication." *Contemporary Approaches in Social Science Researches* 435 (2019): 435–442.
- Fuller, Lon L. "Mediation—Its Forms and Functions." In *Mediation*, 3–37. Routledge, 2018.
- Hagen, Jamie J. "Queering Women, Peace and Security." *International Affairs* 92, no. 2 (2016): 313–332.
- Hartiningsih, Hartiningsih. "Tanggapan Masyarakat Terhadap Konten Media Massa Dalam Kasus Konflik Antar Warga Di Kabupaten Sigi." *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* 19, no. 2 (n.d.): 517235.
- Hoffmann, Julia, and Virgil Hawkins. *Communication and Peace*. Taylor & Francis, 2015.
- Iqbal, Muhammad. "PENANGANAN KONFLIK SOSIAL MELALUI LEMBAGA ADAT (Tinjauan Historis Konflik Warga Desa Karawana Dengan Desa Soulowe Kabupaten Sigi)." *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian* 4, no. 2 (2022).
- Kordnoghabi, R, Sh Moradi, and A Delfan Beiranvand. "The Role of Empathy, Communication Skills and Conflict Resolution in Reducing Adolescents' Aggressive Behavior: Violence at Schools." *Contemporary Psychology* 12, no. 2 (2017): 172–185.

- Littlejohn, Stephen W, and Kathy Domenici. *Communication, Conflict, and the Management of Difference*. Waveland Press, 2007.
- Masturi, Ade. “Membangun Relasi Sosial Melalui Komunikasi Empatik (Perspektif Psikologi Komunikasi).” *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 4, no. 1 (2010): 14–31.
- Meyer, Douglas J, Franklin J Boster, and Michael L Hecht. “A Model of Empathic Communication.” *Communication Research Reports* 5, no. 1 (1988): 19–27.
- Rajagukguk, Irene. “Perempuan Dalam Lingkaran Terorisme: Agen Kekerasan Atau Agen Perdamaian?” *Aradha: Journal of Divinity, Peace and Conflict Studies* 3, no. 2 (2023): 135–145.
- Shutadi, Abdul Aziz, Adi Soeprpto, S Sos, Alfath Julfi, Eddy Silamat, Ir Djoko Soelistya, Rahmad Surya Hadi Saputra, Isra Muksin, S Sos, and Karjo Nalu. *Mengelola Konflik Dalam Organisasi: Teknik, Strategi, Dan Aplikasi*. PT. Nawala Gama Education, 2025.
- Stiff, James B, James Price Dillard, Lilnabeth Somera, Hyun Kim, and Carra Sleight. “Empathy, Communication, and Prosocial Behavior.” *Communications Monographs* 55, no. 2 (1988): 198–213.
- Wahyu, Retno, Sari Perdanawati, and Nur Maulida. “Srikandi Lintas Iman: Praktik Gerakan Perempuan Dalam Menyuarakan Perdamaian Di Yogyakarta.” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 13, no. 2 (2019): 293–312.